

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tirong

¹Riyani, ²Andi Patimbangi, ³Rahma Hidayanti Darwis

^{1,2,3} Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

E-mail: riyani12122004@gmail.com, andipatimbangi@yahoo.com,
rahma_darwis@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan 56 responden sebagai sampel melalui teknik sampling jenuh. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, baik secara parsial maupun simultan. Ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 72,1% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata kunci : Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas, Dana Desa

ABSTRACT

This article aims to analyze the influence of apparatus competence, community participation, and the utilization of information technology on the accountability of village fund management in Tirong Village, Palakka District, Bone Regency. This research uses a quantitative associative method with a saturated sampling technique involving 56 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 26. The results indicate that apparatus competence, community participation, and information technology utilization have a positive and significant effect on village fund management accountability, both partially and simultaneously. These three variables contribute 72.1% to village fund management accountability, while the remaining is influenced by other factors outside the research model.

Keyword : Competency of Village Officials, Community Participation, Utilization of Information Technology, Accountability, Village Funds

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pedesaan. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana desa melalui kebijakan Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kewenangan pemerintah

desa dalam mengelola keuangannya secara mandiri.¹

Dalam skala nasional, alokasi Dana Desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya menunjukkan tren yang sangat besar dan terus meningkat. Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dengan jumlah yang signifikan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari Rp70 triliun per tahun yang disalurkan ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Sri Mulyani Indrawati dalam pemberitaan terbaru yang menyebutkan bahwa hingga 19 Juni 2025, realisasi transfer Dana Desa telah mencapai Rp37,38 triliun.² Besarnya alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis desa sebagai ujung tombak pemerataan kesejahteraan. Namun, semakin besar dana yang dikelola, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya agar dana tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Tujuan utama kebijakan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan

kelembagaan desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan akuntabilitas, seperti rendahnya transparansi penggunaan anggaran, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan di lapangan. Pelaksanaan pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait rendahnya akuntabilitas pengelolaan. Hal ini terlihat dari rendahnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, minimnya pemanfaatan pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, serta masih adanya aparatur desa yang memiliki pemahaman teknis dan kompetensi terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berpotensi menimbulkan penyimpangan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.³

Menurut teori birokrasi Weber, kualitas kompetensi aparatur memegang peranan penting dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan

¹ Ahmad Wahyudi Zein, Dhany Saputra Sembiring, dan Ema Julia Ningsih, "Peran Strategis Dana Desa dalam APBN: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* Vol. 3, no. No. 2 (2025): h. 204-213.

²Ekonomi Bisnis, "Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025," Diakses pada Tanggal 02 Mei

2026, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250625/10/1888155/sri-mulyani-transfer-dana-desa-rp3738-triliun-per-19-juni-2025>

³ Ayyub, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* (2026).

publik karena kompetensi yang memadai mampu mendorong profesionalisme dan tanggung jawab kerja tinggi.⁴ Aparatur yang kompeten akan menjalankan tugasnya sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas sehingga kebijakan publik dapat terlaksana secara efektif. Selain kompetensi aparatur, **partisipasi masyarakat** juga menjadi faktor penting yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula pengawasan dan kontrol sosial terhadap jalannya program desa. Di samping itu, **pemanfaatan teknologi informasi (TI)** berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, karena melalui sistem digital proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akurat, sehingga mampu mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Penelitian Fitri dan Tituk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵ Begitu pula Deviyanti pada tahun 2022 menemukan bahwa pemanfaatan TI di Bandung meningkatkan efisiensi pelaporan dan mempermudah masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa.⁶ Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu tersebut, masalah ini menjadi menarik untuk diteliti secara empiris di desa tirong. Namun, hasil penelitian di daerah lain menunjukkan variasi; misalnya Kharisma dan Widajantie pada tahun 2021 di Kecamatan Paciran menemukan kompetensi aparatur dan pemanfaatan TI signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh.⁷ Sementara itu, penelitian Sari, Tyasari, dan Irianto pada Tahun 2023 di Kecamatan Gondanglegi juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan TI signifikan, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh.⁸ Kemudian Adelia dan Harahap pada tahun 2022 di Deli Serdang menemukan kompetensi aparatur, TI, dan komitmen organisasi berpengaruh

⁴Purwati "Akuntabilitas Dana Desa Berbasis Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal", *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.26 No.2 (2024), H. 418–32.

⁵ Fitri Tina Kharisma dan Tituk Diah Widajantie, "Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan TI Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)," *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 2 (2021): 40–44.

⁶Deviyanti Dan Wati, "Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi

Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung)". April 2022, H. 1-13.

⁷ Fitri Tina Kharisma and Tituk Diah Widajantie, "Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan TI Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)," *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 2 (2021): 40–44.

⁸ Defi Indah Sari, Irma Tyasari, dan Mochamad Fariz Irianto, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan K Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)," *Jurnal Akuntansi Neraca* 1, no. 1 (2023): 1–15.

positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.⁹

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *literature gap*, khususnya terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat yang pada sebagian penelitian berpengaruh signifikan, namun pada penelitian lain tidak. Hal ini menjadi menarik untuk diuji lebih lanjut secara empiris pada konteks sosial yang berbeda, khususnya di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, yang hingga kini belum pernah menjadi objek penelitian serupa.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pelaksanaan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal, terlihat dari rendahnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan minimnya pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, serta adanya aparatur desa yang masih terbatas pemahaman teknis dan kompetensinya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tirong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang bermanfaat dalam penguatan teori dan praktik pengelolaan dana desa.

Pemilihan Desa Tirong sebagai lokasi penelitian juga didukung oleh adanya perhatian publik terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan pemberitaan

media pada tahun 2024, terdapat dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang berkaitan dengan beberapa kegiatan pembangunan di desa tersebut.¹⁰ Meskipun dugaan tersebut telah mendapat klarifikasi dari pemerintah desa dan belum memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap, kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, Desa Tirong menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pada era digital, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Pemerintah pusat bahkan telah mendorong desa untuk memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDes) dan aplikasi pelaporan lainnya untuk memperkuat transparansi. Namun, dalam temuan awal di Desa Tirong, penggunaan teknologi tersebut belum optimal karena keterbatasan pemahaman aparat desa dan kurangnya pendampingan teknis. Padahal, teknologi informasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keterbukaan pelaporan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan yang perlu diukur secara sistematis

⁹ Anisa Putri Adelia and Wilda Sri Munawaroh Harahap, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang," Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen 2, no. 1 (2022): 156–68.

¹⁰Investigasi Warta, "Di Duga Kepala Desa Tirong Menyalahgunakan Dana Desa di Pembangunan Tahun Anggaran 2023 Di Kec.Palakka, Kab.Bone", diakses pada tanggal 05 Juli 2026, <https://investigasi.wartaglobal.id/2024/10/di-duga-kepala-desa-tirong-menyalah.html>

menggunakan metode penelitian kuantitatif.¹¹

Penelitian ini memiliki **kebaharuan (novelty)** dengan menguji secara simultan pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan TI terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tirong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur penelitian kuantitatif mengenai pengelolaan dana desa di wilayah pedesaan Sulawesi Selatan, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi aplikatif bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong partisipasi masyarakat secara optimal, dan memanfaatkan TI secara efektif untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sekaligus melengkapi dan memperkaya hasil penelitian terdahulu.

2. LANDASAN TEORI

Kompetensi Aparatur

Kompetensi pada hakikatnya diartikan sebagai sebuah kecakapan,

keterampilan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.¹²

Menurut Atiningsi dari beberapa teori yang dikemukakan, “kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang terbuang. Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek.

Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Kompetensi menurut Spencer (1993) dalam penelitian Bayu Erdian¹³ adalah karakteristik dasar individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dalam suatu pekerjaan. Kompetensi aparatur desa berarti kemampuan yang dimiliki perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara profesional.¹⁴

¹¹ Fara Dita, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo)” (2022): 54–65.

¹² Heny M.A. Hinghar, “Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor” 9, No. 4 (2023): 315–30.

¹³ Bayu Erdian Syah, “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Kinerja Dan Produktivitas Pegawai Dalam Melayani Masyarakat Desa Studi Kasus Pemerintah Desa Kalisalak,” no. 2 (2023) <https://doi.org/10.55606/jubima.v1i2.1371>.

¹⁴ Lasti Ika Andriyana, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Pada Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2022),” 2020, 1–30.

Beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

Dalam perspektif teori birokrasi Weber, aparatur yang kompeten harus memiliki keterampilan teknis, disiplin, dan bertindak sesuai aturan untuk mewujudkan akuntabilitas. Kompetensi yang rendah menyebabkan lemahnya kinerja dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana desa.¹⁵

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang berarti mengambil bagian. *Participant* dimaknai sebagai yang mengambil bagian atau sering disebut dalam bahasa umum sebagai keikutsertaan. Selengkapnya partisipasi sering dikatakan sebagai peran serta atau ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Partisipasi merupakan keterlibatan mental, pikiran dan emosi atau perasaan di dalam situasi kelompoknya yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap mencapai tujuan bersangkutan.¹⁶

Menurut Mikkelson, partisipasi merupakan kontribusi sukarela dari

masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepas dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan.¹⁷ Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipasi memperkuat kontrol sosial dan mencegah praktik penyimpangan. Menurut teori *Good Governance*, partisipasi merupakan salah satu prinsip dasar yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik.

Masruri menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan, baik keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung, materiil maupun non materiil. Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang krusial pada pembangunan desa. Prasyarat yang harus ada dalam proses pembangunan berkelanjutan merupakan mengikutsertakan seluruh anggota rakyat/masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Menurut Nuraiti dan Bambang, dalam partisipasi masyarakat dimana masyarakat diberi kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Partisipasi komunitas dalam pengembangan masyarakat adalah suatu proses bertingkat dari pendistribusian kekuasaan pada komunitas sehingga mereka memperoleh kontrol lebih besar pada hidup mereka sendiri.¹⁸

¹⁵ Muhammad Zamroni Abidin Junior, "Reformasi Birokrasi Melalui Digitalisasi Di Desa Pleret", Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol. 7.No. 1, 2024, H. 59-74.

¹⁶ Mustikasari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Kabupaten Luwu Timur" (2020).

¹⁷ Valentinus, Ismail, And Kapa, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi

Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

¹⁸ Ranti Melasari, Suryani, And Putri Indriyani, "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batang Tuaka Kab. Indragiri

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurut Arnstein dalam konsep *ladder of participation*, partisipasi bukan hanya keterlibatan simbolis, melainkan bentuk nyata keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.¹⁹

Mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers dalam Purnamasari yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

- a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- b) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
- c) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.²⁰

Partisipasi dalam perencanaan mempunyai segi positif adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program – program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan dari segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antara kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau menghambat tercapainya keputusan bersama. Partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat besar sukar dilakukan, dan hanya dapat dilakukan dengan sistem perwakilan

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa berperan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Teknologi informasi memungkinkan aparatur desa dan masyarakat mengakses data, mengelola informasi, serta melakukan komunikasi dengan lebih cepat dan akurat.²¹

Menurut teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan Davis (1989), keberhasilan pemanfaatan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan)

Hilir,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 12, No. 2 (2024): 101–10, <https://doi.org/10.32520/Jak.V12i2.3052>.

¹⁹ Rofi Ahmad Dan Susilawati, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa", Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 4.No. 1 (2023), H. 49-63.

²⁰ Mustikasari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Kabupaten Luwu Timur.”

²¹ Rifki Forisa Riofan Gandi, Maxion Sumtaky, Dan Dyah Ani Pangastuti, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening”, Jurnal Global Ilmiah, Vol. 2.No. 5 (2025), H. 1-11.

dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan).²²

Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

a) Aspek Aksesibilitas

Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi aparatur desa dan masyarakat dalam memperoleh data mengenai keuangan desa. Aksesibilitas ini mencakup ketersediaan perangkat (komputer, internet, aplikasi sistem keuangan desa/Siskeudes) dan kemampuan pengguna untuk mengakses informasi secara cepat. Akses yang terbuka memastikan setiap pihak dapat mengetahui kondisi keuangan desa dengan mudah.

b) Aspek Transparansi

Melalui teknologi informasi, laporan keuangan desa dapat dipublikasikan secara daring atau melalui aplikasi yang dapat diakses masyarakat. Hal ini mencegah praktik manipulasi data karena setiap transaksi dapat terdokumentasi dengan jelas. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.

c) Aspek Efisiensi dan Efektivitas

Sistem berbasis teknologi mempercepat proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan keuangan desa. Efisiensi tercapai karena proses manual yang memakan waktu dapat diminimalkan. Selain itu, efektivitas penggunaan teknologi juga terlihat dari minimnya kesalahan pencatatan (*human*

error) serta peningkatan akurasi data.

d) Aspek Akuntabilitas

Teknologi informasi menyediakan bukti digital (*digital trail*) yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban aparatur desa. Misalnya, penggunaan aplikasi Siskeudes menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah pusat, sehingga memudahkan proses audit. Dengan demikian, aparatur desa dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara lebih jelas dan terukur.

e) Aspek Partisipasi Masyarakat

Pemanfaatan teknologi tidak hanya memudahkan aparatur, tetapi juga meningkatkan peran masyarakat. Melalui akses ke informasi publik, masyarakat dapat melakukan pengawasan, memberikan masukan, serta turut serta dalam evaluasi program. Hal ini memperkuat prinsip *good governance* di tingkat desa.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa tidak sekadar persoalan penggunaan perangkat digital, tetapi lebih jauh menyangkut peran teknologi sebagai sarana untuk memperkuat keterbukaan, kecepatan pelayanan, efisiensi administrasi, serta akuntabilitas publik. Jika teknologi digunakan dengan optimal, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa akan semakin meningkat dan risiko penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada Mahasiswa Rantau Pengguna E-Money Di Surabaya)', Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, Vol 4.No. 1 (2025), H. 1296-1307

²² Dian Febiyanti And Raden Johnny Hadi Raharjo, 'Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Dengan Pengelolaan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah (*principal*). Dalam konteks desa, akuntabilitas mencakup tanggung jawab aparatur dalam mengelola dana desa secara transparan, jujur, dan sesuai peraturan. Menurut Mardiasmo (2018) dalam Nur Muhammad dan Fitri Wahyuni, akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural.²³

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Romzek & Dubnick (1987), akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk menjawab, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan mereka kepada pihak yang berhak. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas berarti bahwa aparatur desa wajib mempertanggungjawabkan setiap tahapan penggunaan anggaran kepada masyarakat, pemerintah supra-desa, maupun lembaga pengawas. Akuntabilitas berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Pendekatan ini dipilih untuk menguji hipotesis dan memperoleh data empiris yang objektif dan terukur melalui

proses pengumpulan serta analisis data statistik.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh aparatur desa dan masyarakat Desa Tirong yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, dengan total populasi sebanyak 56 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus atau *sampling jenuh*, di mana seluruh anggota populasi (56 orang) ditetapkan sebagai responden penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pengelolaan dana desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berskala Likert untuk mendapatkan data primer dan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder sebagai bukti pendukung kondisi administrasi desa. Alat analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.0, yang mencakup uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas), serta analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antarvariabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_0 :Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_1 :Kompetensi Aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

²³ Nur Muhammad Dan Fitri Wahyuni, 'Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa', Jurnal Manajemen Dinamis, Vol. 2.No. 2 (2024), H. 59-72.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki nilai t hitung sebesar 10,904 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,985, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Artinya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa aparatur desa yang memiliki kompetensi yang baik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja, akan lebih mampu melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dana desa secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi tersebut memungkinkan aparatur memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat diminimalkan.

Secara konseptual, hasil penelitian ini sejalan dengan teori kompetensi yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang mencerminkan kemampuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif.²⁴ Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu menjalankan tugas pengelolaan dana desa secara profesional, transparan, dan

bertanggung jawab. Hal ini penting karena pengelolaan dana desa berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga membutuhkan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Atiningsih, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung kinerja pegawai.²⁵ Dalam konteks pengelolaan dana desa, pengetahuan aparatur mengenai regulasi dan prosedur keuangan desa akan membantu meminimalisir kesalahan administratif. Selain itu, keterampilan teknis seperti penyusunan laporan keuangan dan penggunaan teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Lebih lanjut, sikap aparatur seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa serta lebih transparan dalam pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga aspek moral yang sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam perspektif teori birokrasi Weber, kompetensi aparatur merupakan syarat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.²⁶ Aparatur yang kompeten akan bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sehingga mampu meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat meningkatkan risiko kesalahan

²⁴ Heny M.A. Hinghar, "Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor" 9, No. 4 (2023): 315–30.

²⁵ Lasti Ika Andriyana, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kompetensi

Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Pada Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2022)," 2020, 1–30.

²⁶ Muhammad Zamroni Abidin Junior, "Reformasi Birokrasi Melalui Digitalisasi Di Desa Pleret", Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol. 7.No. 1, 2024, H. 59-74.

bahkan penyalahgunaan dana desa yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berperan sebagai faktor pembeda antara kinerja yang optimal dan yang kurang optimal. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan tepat waktu, serta menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, pengalaman kerja juga menjadi bagian penting dari kompetensi aparatur. Aparatur yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana desa akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Pengalaman tersebut membantu aparatur dalam mengambil keputusan yang tepat serta menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Defi Indah Sari, dkk (2023)²⁷ menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menguatkan bahwa kompetensi menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Selanjutnya, penelitian Alexander, dkk tahun 2021²⁸ juga menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur tidak hanya

berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada sistem pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, kompetensi aparatur memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur yang kompeten akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, mematuhi aturan yang berlaku, serta menghasilkan laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa sehingga tujuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

b. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_0 :Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_2 :Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai t hitung sebesar 9,264 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,985, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa

²⁷ Sari, Tyasari, And Irianto, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)."

²⁸ Valentinus, Ismail, And Kapa, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende)."

partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, H0 ditolak dan H2 diterima, yang berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, mampu mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat meningkatkan transparansi serta mendorong aparatur desa untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Secara rasional, hipotesis ini diterima karena akuntabilitas tidak hanya bergantung pada kemampuan aparatur desa, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari pembangunan desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar pula pengawasan publik terhadap setiap kebijakan dan penggunaan dana desa.

Secara teoritis, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, emosional, dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai.²⁹ Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut teori *Good Governance*, partisipasi masyarakat merupakan salah

satu prinsip utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.³⁰ Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, aparatur desa akan lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa karena merasa diawasi secara langsung oleh masyarakat. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, partisipasi dalam pengambilan keputusan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal ini penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi dan prioritas masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih representatif dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam dimensi pelaksanaan, partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan desa, seperti gotong royong atau kontribusi tenaga dan sumber daya. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan program tersebut.³¹ Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi juga memiliki peran yang sangat

²⁹ Mustikasari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Kabupaten Luwu Timur."

³⁰ Valentinus, Ismail, And Kapa, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi

Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

³¹ Abdul Aziz, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

penting. Melalui keterlibatan dalam pengawasan, masyarakat dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan perencanaan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alexander Valentinus, dkk (2022)³², yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian Purwati (2024)³³ juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Temuan ini semakin memperkuat hasil penelitian ini bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa agar tercipta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H₀ :Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H₃ :Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t hitung sebesar 4,019 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,985, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H₃) diterima.

Diterimanya hipotesis tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi oleh aparatur Desa Tirong, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini dapat dijelaskan karena teknologi informasi mampu mendukung setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan aplikasi dan sistem informasi dalam administrasi keuangan desa juga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mengurangi risiko manipulasi

Di Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna", Jurnal Dialogika Manajemen Dan Administrasi, Vol. 6, No. 2, Juni 2025, H. 101-109.

³² Valentinus, Ismail, And Kapa, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

³³ Purwati Purwati, "Akuntabilitas Dana Desa Berbasis Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal," Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 26, No. 2 (2024): 418–32, <https://doi.org/10.35591/Wahana.V26i2.872>.

data, serta mempermudah proses pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah maupun masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi oleh aparatur desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Teknologi informasi mampu mendukung proses pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis, transparan, dan terstruktur sehingga meminimalisir kesalahan serta potensi penyimpangan.

Dalam perspektif teori, hasil penelitian ini sejalan dengan konsep *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*).³⁴ Ketika aparatur desa merasa bahwa teknologi memberikan manfaat nyata dan mudah digunakan, maka mereka akan cenderung memanfaatkannya secara optimal dalam pengelolaan dana desa.

Dari aspek aksesibilitas, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan aparatur desa untuk mengakses dan mengelola data keuangan secara cepat dan mudah. Ketersediaan sistem seperti aplikasi Siskeudes membantu mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, sehingga informasi keuangan dapat diakses kapan saja dan oleh pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, dari aspek transparansi, teknologi informasi memberikan ruang bagi publikasi laporan keuangan desa secara terbuka. Dengan adanya sistem digital, setiap transaksi dapat terdokumentasi dengan baik sehingga meminimalisir praktik manipulasi data. Transparansi ini secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Dari sisi efisiensi dan efektivitas, penggunaan teknologi informasi mampu mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat dan tepat waktu. Pada aspek akuntabilitas, teknologi informasi menyediakan jejak digital (*digital trail*) yang dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban.³⁵ Hal ini sangat penting dalam proses audit maupun evaluasi, karena setiap aktivitas keuangan tercatat secara sistematis dan dapat ditelusuri dengan mudah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fasiha Putri Unsa dkk. (2024)³⁶ yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi hasil penelitian dalam konteks yang serupa. Selanjutnya, penelitian Defi Indah Sari dkk. (2023)³⁷ juga

³⁴ Dian Febiyanti And Raden Johnny Hadi Raharjo, 'Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Dengan Pengelolaan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Mahasiswa Rantau Pengguna E-Money Di Surabaya)', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, Vol 4.No. 1 (2025), H. 1296-1307

³⁵ Ilham Ramadhan Nasution Dan Budianto, "Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun)", *Warta*

Dharmawangsa, Vol. 19.No. 1, 2025, H. 523-530.

³⁶ Fasiha Putri Unsa Et Al., "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Simo)," *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* . 12, No. 2 (2024): 367–76, [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/20070%0ahttp://Repository.Uinsu.Ac.Id/20070/3/Bab Ii.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/20070%0ahttp://Repository.Uinsu.Ac.Id/20070/3/Bab%20Ii.Pdf).

³⁷ Sari, Tyasari, And Irianto, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi

mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat bukti empiris mengenai pentingnya teknologi dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur serta menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai agar pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

d. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_0 :Komptensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_4 :Komptensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai F hitung sebesar 44,904 yang lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 3,09. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan

variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_4) diterima, sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak.

Diterimanya hipotesis tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih memahami regulasi, prosedur administrasi, serta mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa secara tepat. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan penyusunan laporan, meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat akses informasi, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, keterlibatan masyarakat, serta penggunaan teknologi informasi secara bersama-sama akan mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Nilai F hitung yang cukup besar menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan memiliki tingkat kelayakan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Artinya, kombinasi dari ketiga variabel tersebut merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam upaya

Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).”

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,721 atau 72,1%. Ini berarti bahwa sebesar 72,1% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Variabel tersebut dapat berupa faktor seperti kepemimpinan kepala desa, sistem pengawasan, budaya organisasi, maupun tingkat pendidikan masyarakat yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tingginya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa.³⁸ Hal ini juga mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan akuntabilitas. Jika dikaitkan dengan teori, akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat secara transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, kompetensi aparatur menjadi faktor utama karena aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik akan mampu menyusun laporan keuangan dengan benar serta menjalankan prosedur yang sesuai.

Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, karena melalui keterlibatan

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, maka akan tercipta kontrol sosial yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.³⁹ Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung terciptanya akuntabilitas, terutama dalam hal transparansi dan kemudahan akses informasi. Teknologi memungkinkan penyajian laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia Ishardayanti dkk. (2025)⁴⁰ yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian oleh Anisa Putri Adelia dan Wilda Sri Munawaroh Harahap (2022) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas perangkat, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa faktor-faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam menciptakan akuntabilitas.

Kemudian, keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi, khususnya pada variabel partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa data yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi salah satu asumsi

³⁸ Nur Muhammad Dan Fitri Wahyuni, 'Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Manajemen Dinamis*, Vol. 2.No. 2 (2024), H. 59-72.

³⁹ Anatul Widiyanti Dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Pada Desa Kramatwatu", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9.No. 8 (2025).

⁴⁰ Ishardiyanti, Mahmud, and Mauzu, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Teknologi Informasi, <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.612>."

dalam analisis regresi Dampaknya, hasil pengujian statistik seperti Uji- T dan Uji F dapat menjadi kurang akurat sebagai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa perlu ditafsirkan dengan lebih hati-hati. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap dapat memberikan gambar mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan analisis yang lebih mampu mengatasi masalah heteroskedastisitas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tirong, baik secara parsial maupun simultan. Sinergi antara peningkatan kapabilitas aparatur, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi terbukti menjadi faktor krusial dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab sesuai prinsip *good governance*.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, atas izin dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat Desa Tirong yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga sebagai responden, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, Anisa Putri, dan Wilda Sri

Munawaroh Harahap. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen* 2, no. 1 (2022): 156–168.

Ahmad, Rofi, dan Susilawati. "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol. 4, no. No. 1 (2023): h. 49-63.

Andriyana, Lasti Ika. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus pada Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2022)" (2020): 1–30.

Ayyub. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* (2026).

Aziz, Abdul. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna." *Jurnal DIALOGIKA Manajemen dan Administrasi* Vol. 6, no. No. 2 (n.d.): h. 101-109.

Bisnis, Ekonomi. "Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025."

Dian Febiyanti, dan Raden Johnny Hadi Raharjo. "Pengaruh Technology Acceptance Model dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi dengan Pengelolaan Keuangan sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Mahasiswa Rantau Pengguna E-Money di Surabaya)."

- Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* Vol 4, no. No. 1 (2025): h. 1296-1307.
- Dita, Fara. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo)" (2022): 54–65.
- Forisa Riofan Gandi, Rifki, Maxion Sumtaky, dan Dyah Ani Pangastuti. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Global Ilmiah* Vol. 2, no. No. 5 (2025): h. 1-11.
- Hinghar, Heny M.A. "Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor" 9, no. 4 (2023): 315–330.
- Ishardiyanti, Aulia, Mahmud Mahmud, dan Fahrul Mauzu. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Informasi." *Advances in Management & Financial Reporting* 3, no. 3 (2025): 844–857.
- Kharisma, Fitri Tina, dan Tituk Diah Widajantie. "Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan TI dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)." *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 2 (2021): 40–44.
- Melasari, Ranti, Suryani, dan Putri Indriyani. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 2 (2024): 101–110.
- Muhammad, Nur, dan Fitri Wahyuni. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Manajemen Dinamis* Vol. 2, no. No. 2 (2024): h. 59-72.
- Muhammad Zamroni Abidin Junior. "Reformasi Birokrasi Melalui Digitalisasi Di Desa PLERET." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* Vol. 7, no. No. 1 (2024): h. 59-74.
- Mustikasari. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Kabupaten Luwu Timur" (2020).
- Nasution, Ilham Ramadhan, dan Budianto Budianto. "Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun)." *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2025): 523–530.
- Purwati, Purwati. "Akuntabilitas Dana Desa Berbasis Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 26, no. 2 (2024): 418–432.
- Sari, Defi Indah, Irma Tyasari, dan Mochamad Fariz Irianto. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan K Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)." *Jurnal Akuntansi Neraca* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Syah, Bayu Erdian. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Kinerja Dan Produktivitas Pegawai

Dalam Melayani Masyarakat Desa Studi Kasus Pemerintah Desa Kalisalak,” no. 2 (2023).

Unsa, Fasiha Putri, Wulandari Amy, Alean Kistiani Hegy Suryana, dan Yunita Niqrisah D.P. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Penggunaan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Simo).” *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* . 12, no. 2 (2024): 367–376.

Valentinus, Alexander, Nuraini Ismail, dan Sesilianus Kapa. “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 1–10.

———. “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende)” 2, no. 1 (2021): 1–10.

Widiyanti, Anatul, Laeli Nur Khanifah, Alya Rahmah Sita, Asti Julianidisi, Nathania Aulia, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan, dan Ageng Tirtayasa. “Akuntabilitas pengelolaan dana desa : studi pada desa kramatwatu.” *JTriwikrama : Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 9, no. No. 8 (2025).

Zein, Ahmad Wahyudi, Dhany Saputra Sembiring, dan Ema Julia Ningsih. “Peran Strategis Dana Desa dalam APBN: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* Vol. 3, no. No. 2 (2025): h. 204-213.